

LAPORAN PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN HIBAH STRATEGIS NASIONAL
SUMBER DANA DIPA PTN
TAHUN 2012



Judul Penelitian : Akselerasi Daya Dukung *E-Procurement* dan
Model Penumbuhan Iklim Usaha Daerah
berbasis E-Gov

Ketua : Rachmat Hidayat, S.Sos., MPA

Anggota : Suji, .Sos.; Msi

Dibiayai oleh DP2M/DIPA PTN
Nomor : 024/SP2H/PL/Dit.Litabmas/III/2012
Tanggal: 07 Maret 2012

DAFTAR ISI

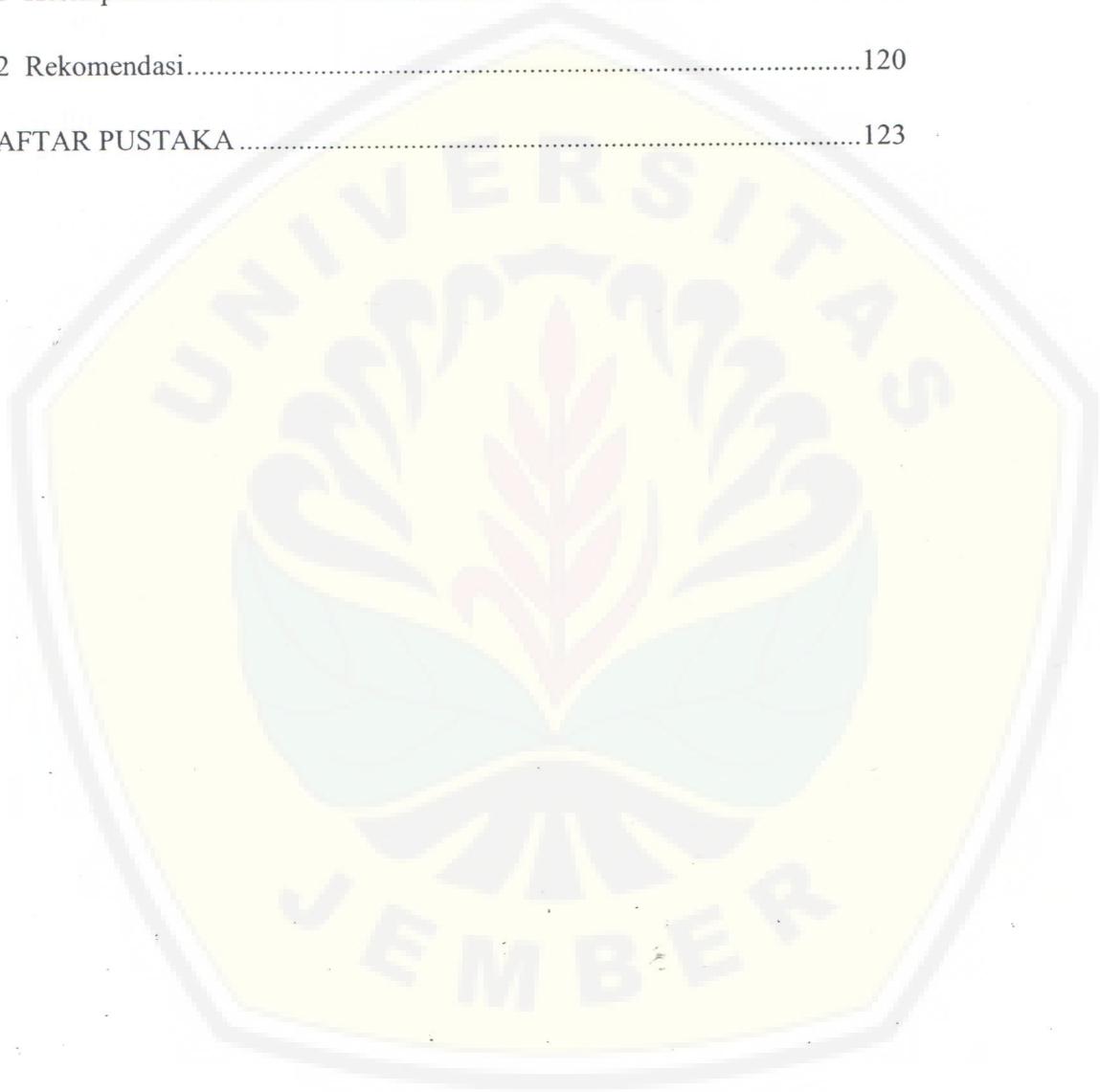
Halaman Judul	1
Daftar Isi	2
Kata Pengantar.....	7
Daftar Tabel	8
Daftar Gambar	11
Halaman Pengesahan	12
Ringkasan Penelitian.....	15
BAB. I PENDAHULUAN.....	14
1.1 Pendahuluan.....	16
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 <i>Electronic Government</i>	18
2.1.1 <i>Electronic Government</i> dan Realisasi dalam Masyarakat	20
2.2 <i>E-Procurement</i>	21
2.2.1 Indikator Kesiapan dari Pemerintah Daerah.....	21
2.2.2 Indikator Kesiapan dari Pihak Bisnis.....	23
2.2.3 Indikator Kesiapan dari Sisi Masyarakat	23
2.3 Penumbuhan Iklim Usaha.....	25
2.3.1 Aspek Lingkungan Usaha dan Hambatan Perizinan.....	24
2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian ini	26
2.4.1 <i>Road Map</i> Penelitian.....	27
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	29
3.1 Tujuan Khusus.....	29

3.2. Urgensi Penelitian.....	29
BAB. IV METODE PENELITIAN.....	31
4.1 Penentuan Lokasi Penelitian.....	31
4.2 Instrumen Penelitian.....	31
4.3 Praktek Pengumpulan Data dan Informasi.....	31
4.4 Diskusi Temuan-temuan Lapangan dalam Tim.....	32
4.5 Analisa Data dan Informasi.....	32
4.5.1 Analisa <i>check</i> dan <i>cross check</i>	32
4.5.2 Pembuatan Rangkuman secara Deskriptif.....	32
4.6 Penggunaan Data Hasil Penelitian di Lapangan.....	32
4.7 Kesimpulan Hasil Penelitian di Lapangan.....	32
4.8 Pengambilan Kesimpulan.....	33
4.9 Alur dan Tahapan Penelitian.....	33
BAB. V GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN.....	38
5.1 Gambaran Umum Kabupaten Sampang.....	38
5.1.1 Penduduk Kabupaten Sampang.....	36
5.1.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Perekonomian.....	38
5.1.3 Susunan Organisasi Perangkat Desa Kabupaten Sampang.....	42
5.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Sampang.....	46
5.1.5 Kepemilikan <i>Web</i> SKPD Kabupaten Sampang.....	49

5.2	Gambaran Umum Kabupaten Kediri	53
5.2.1	Letak Geografis.....	53
5.2.2	Jumlah Penduduk.....	52
5.2.3	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Perekonomian	53
5.2.4	Visi dan Misi Kabupaten Kediri	54
5.2.4.1	Visi Kabupaten Kediri	54
5.2.4.1	Misi Kabupaten Kediri.....	54
5.2.5	Kepemilikan <i>Web</i> SKPD Kabupaten Kediri.....	55
5.3	Gambaran Umum Kabupaten Jember.....	58
5.3.1	Letak Geografis.....	56
5.3.2	Wilayah Administrasi	56
5.3.3	Keadaan Penduduk	57
5.3.3	Kepadatan Penduduk	59
5.3.5	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Perekonomian	61
5.3.6	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jember.....	62
5.3.7	Kepemilikan <i>Web</i> SKPD Kaabupaten Jember.....	67
5.4	Gambaran Umum Kota Surabaya.....	70
5.4.1	Letak Geografi	70
5.4.2	Keadaan Penduduk	72

5.4.3 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Perekonomian	71
5.4.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kotamadya Surabaya	72
5.4.5 Visi dan Misi Tahun 2011-2015	75
5.4.5.1 Visi.....	75
5.4.5.2 Misi.....	77
5.4.5.3 Tujuan.....	78
5.4.5.4 Sasaran.....	80
5.4.6 Kepemilikan <i>Web</i> SKPD Kotamadya Surabaya.....	82
BAB. VI PEMBAHASAN	85
6.1 Identifikasi Program Inovatif Pimpinan Daerah.....	85
6.2 Dukungan SDM Aparatur	86
6.3 Kerangka Dasar Hukum <i>E-Procurement</i>	87
6.4 Mekanisme <i>E-Proc</i> di Indonesia.....	90
6.5 Identifikasi Sarana dan Prasarana Pendukung.....	93
6.5.1 Proses Pendaftaran Penyedia untuk Menggunakan SPSE	94
6.6 Karakteristik Kerja Sama Pemda dengan Swasta	105
6.7 Kesadaran Pemerintah Menggunakan IT dalam Proses Kerja Sama.....	106
6.8 Dorongan Kuat dalam Proses Transparansi yang Sehat	108
6.8.1 Daya Dukung yang dibutuhkan <i>E-Proc</i>	108
6.9 Interpretasi Hasil Penelitian.....	109

6.10 <i>E-Proc</i> dan Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	113
6.11. Beberapa Keuntungan sistem e-Proc.....	114
6.12. Manfaat e-Procurement dalam persaingan usaha.....	116
BAB. VII KESIMPULAN dan REKOMENDASI.....	118
7.1 Kesimpulan.....	118
7.2 Rekomendasi.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123



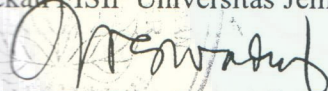
HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN HIBAH STRATEGIS NASIONAL

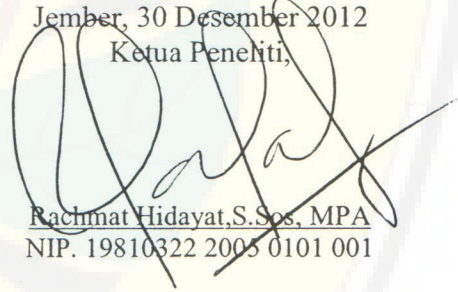
Judul Penelitian : Akselerasi Daya Dukung *E-Procurement* dan Model
Penumbuhan Iklim Usaha Daerah berbasis E-Gov

1. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Rachmat Hidayat
 - b. Jenis Kelamin : Pria
 - c. NIP : 19810322 2005 01 1 001
 - d. Jabatan Struktural : -
 - e. Jabatan Fungsional : Penata Muda / IIIa
 - f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Administrasi Niaga
 - g. Alamat : Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto, Jember
 - h. Telpon/ Faks : 0331 335586
 - i. Alamat Rumah : Griya Permata Kampus Blok E/17 Jember
 - j. Telpon/ Faks/ Email : 08155935285
 2. Jumlah anggota Peneliti : 1
 3. Jangka Waktu Penelitian : 8 bulan (tahun 1)
 4. Pembiayaan
 - a. Jumlah biaya yang di ajukan ke DIKTI tahun ke – 1. Rp 80.000.000
 - b. Jumlah Pembiayaan dari sumber lain : Rp. 0
- Total Biaya : **Rp 80.000.000**

Mengetahui :
Dekan FISIP Universitas Jember


Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

Jember, 30 Desember 2012
Ketua Peneliti,


Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA
NIP. 19810322 2005 0101 001

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian UNEJ

Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D
NIP. 196905171992011001

Ringkasan Penelitian

Salah satu aplikasi *E-Government* dalam pelayanan publik adalah *Electronic Procurement* (lelang elektronik) yang berusaha untuk memotong mata rantai birokrasi dan membuat belanja sektor publik untuk lebih efektif dan efisien. Penelitian Terdahulu oleh Singer *et al* (2009) menunjukkan bahwa *E-Procurement* mampu menghemat belanja pemerintah dan membuat proses pengadaan barang dan jasa lebih efisien dan murah. Sedangkan Othman *et al.*(2009) menunjukkan bahwa walaupun *E-Procurement* bisa menjamin proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan akuntabel, namun pemerintah tetap harus melakukan pengawasan berkelanjutan dalam mencegah maupun mengawasi terjadinya korupsi melalui pemalsuan (*fraught*) dalam proses *E-Procurement*.

Penelitian terkait *E-Procurement (E-Proc)* di Indonesia belum banyak dilakukan, sehingga penelitian yang akan dilakukan menjadi sangat signifikan untuk menemukan faktor apa saja yang dapat menjadi daya dukung dan akselerasi pelaksanaan *E-Procurement* yang mampu menumbuhkembangkan iklim usaha daerah secara *akuntabel* dan transparan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui karakteristik inovasi layanan yang menjadi tahapan penting untuk mengetahui kapasitas daerah dalam mengelola aplikasi *E-Gov* pada pelayanan publik, sehingga dapat menentukan strategi yang tepat dalam memberikan daya dukung yang simultan pada pelaksanaan *E-Procurement* yang transparan, akuntabel dan mampu menjadi inisiator akselerasi tumbuh kembangnya iklim usaha daerah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

E-Gov membawa perubahan pada proses pengadaan barang/jasa yang beralih pada penggunaan *E-Procurement (E-Proc)* berbasis teknologi Informasi (TI). Dengan menggunakan *E-Proc*, pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghemat anggaran yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan menggunakan *E-Proc* mencerminkan sebuah keterbukaan atau transparansi sesuai dengan tujuan pemerintah dengan ditunjukkan siapa saja (penyedia barang/jasa) dapat menjadi peserta pengadaan dan proses seleksi sampai pemilihan pemenang dilaksanakan secara terbuka, sehingga kekhawatiran mengenai terjadinya KKN dapat ditekan.

Electronic Government (e-Gov) merupakan suatu konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini di hampir semua pemerintahan Kabupaten kota sudah menerapkan layanan e-Gov baik sebagai media informasi pembangunan, informasi kesehatan, maupun upaya berkomunikasi dengan masyarakat. Seiring pesatnya penggunaan Internet oleh pihak swasta.

Keppres 80/2003 sampai perubahan keempat melalui PP 8/2006 memang tidak mengatur secara terperinci mengenai penggunaan e-Proc. Namun saat ini, perlahan e-Proc menjadi salah satu fitur yang diandalkan Pemerintah daerah dalam sector pelayanan public, hal ini terbukti dari data yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (<http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?mid=7452414057&id=5549072725>, 2011) yang menyebutkan bahwa sampai saat ini sudah terdapat tiga puluh empat (34) Kabupaten /Kota pada tiga puluh tiga (33) provinsi di Indonesia yang sudah melakukan proses lelang maupun tender secara *online*. Penelitian ini menjadi signifikan dilakukan karena berupaya untuk menemukan factor apa saja yang dapat menjadi daya dukung dan akselerasi pelaksanaan e-Procurement yang mampu menumbuh kembangkan iklim usaha daerah secara akuntabel dan transparan. Penelitian ini berupaya menemukan model daya dukung dan akselerasi pelayanan publik berbasis E-Gov yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini juga berupaya

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan yang melekat pada proses implementasi *E-Proc* pada empat lokalitas pemerintahan daerah di Jawa Timur. Terdapat dua aspek utama pada proses implementasi *E-Proc* yang dapat menjadi faktor penghambat akselerasi *E-Proc* dan memunculkan potensi korupsi pada proses pelaksanaan *E-Proc*. Dua faktor tersebut muncul pada dua elemen penting pada proses *E-Proc* yaitu pertama, *user*, dalam hal ini adalah pengguna barang dan jasa / Kementrian, Lembaga, SKPD, maupun institusi terkait. Kedua, adalah *mediator*, dalam hal ini adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) masing-masing Kementrian, Lembaga, SKPD, maupun institusi terkait. Pada aspek *user* masalah yang dapat diidentifikasi tersebut adalah:

1. Upaya SKPD menarik stafnya dari ULP
2. Usulan paket SKPD ke ULP di luar jadwal
3. SKPD mengajukan spesifikasi teknis, mengarah ke satu merk
4. Rakor cenderung tidak dihadiri SKPD .
5. Pembatalan paket pekerjaan pada saat penjelasan dikarenakan perencanaannya belum final.
6. SKPD mengembalikan pemenang (evaluasi ulang) dengan alasan yang tidak tepat.

Masalah tersebut diatas akan memicu munculnya potensi-potensi penyelewengan dibawah ini :

1. Terjadinya KKN antara SKPD dengan pihak eksternal (vendor/rekanan)
2. Terjadinya KKN antara pihak eksternal ULP dengan SKPD, sehingga dapat dimanfaatkan oleh vendor, politisi dan pihak-pihak yang berkepentingan

Pada aspek mediator masalah yang dapat diidentifikasi tersebut adalah:

1. *Misleading* informasi ULP dengan LPSE dengan keberadaan personel ULP di portal LPSE
2. Kinerja sistem LPSE belum maksimal, karena tidak semua *output* telah otomatisasi (manual) seperti Berita Acara, penentuan ranking calon pemenang, dll)